



Analisis Efektivitas Administrasi Pembangunan dalam Mengelola Anggaran Daerah untuk Pembangunan Ekonomi Lokal

Satria Lam Syafi'i Simamora^{1*}, Imsar²

¹⁻² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

satria200165@gmail.com^{1*}, imsar@uinsu.ac.id²

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Korespondensi Penulis: satria200165@gmail.com*

Abstract. *This study employs a qualitative library research method with the primary objective of analyzing the effectiveness of development administration in the management of regional budgets to support local economic development. Development administration is a crucial component in the governance process, encompassing the planning, organizing, directing, and supervising of budget utilization to ensure that resources are allocated in a targeted, efficient, and sustainable manner. Within the context of local governments, the effectiveness of budget management is considered a key indicator of the success of regional development, as it directly reflects the ability of local authorities to implement policies that foster equitable and inclusive growth. The data for this study were obtained from various scientific literature sources, including academic journals, textbooks, and relevant government policy documents addressing budgeting and regional development. The findings of the analysis highlight that successful budget management is strongly influenced by bureaucratic capacity, particularly in terms of administrative competence, professional integrity, and institutional stability. Furthermore, transparency in budget planning processes plays a significant role in building public trust and preventing misallocation of resources. Equally important is the participation of the community in monitoring and evaluating budget implementation, which ensures accountability and responsiveness to public needs. In addition, synergy between legislative and executive bodies is identified as a determining factor in strengthening checks and balances, thereby enhancing the accountability of public fund management. The study concludes that effective development administration not only supports efficient allocation of financial resources but also contributes to accelerating local economic growth, reducing social inequality, and improving community welfare. Ultimately, this research is expected to provide valuable insights and serve as a reference for local governments in formulating strategies for more optimal, transparent, and participatory budget management practices.*

Keywords: *Development administration, Effectiveness, Local economy, Local government, Regional budget*

Abstrak : Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis kepustakaan yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas administrasi pembangunan dalam mengelola anggaran daerah guna mendukung pembangunan ekonomi lokal. Administrasi pembangunan memiliki peran penting dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan penggunaan anggaran agar dapat berjalan secara tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan. Dalam konteks pemerintahan daerah, efektivitas pengelolaan anggaran menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi yang merata, inklusif, dan berkeadilan sosial. Data penelitian diperoleh dari berbagai literatur ilmiah seperti jurnal, buku, serta laporan kebijakan pemerintah yang relevan dengan penganggaran dan pembangunan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran sangat dipengaruhi oleh kapasitas birokrasi, transparansi dalam proses perencanaan, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Selain itu, sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif juga memiliki peran penting dalam memperkuat akuntabilitas pemanfaatan dana publik. Lebih lanjut, administrasi pembangunan yang efektif diyakini mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pengelolaan anggaran yang lebih optimal, berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci: Administrasi pembangunan, Anggaran daerah, Efektivitas, Ekonomi lokal, Pemerintah daerah

1. PENDAHULUAN

Administrasi pembangunan memiliki peran strategis dalam mendukung proses pembangunan nasional maupun daerah. Salah satu instrumen penting dalam administrasi pembangunan adalah pengelolaan anggaran daerah yang efisien dan efektif. Anggaran daerah mencerminkan perencanaan dan prioritas pembangunan, sehingga harus dikelola dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta berorientasi pada hasil. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk dalam pengelolaan anggaran. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak tantangan yang dihadapi, seperti lemahnya perencanaan, tumpang tindih program, serta rendahnya partisipasi publik. Oleh karena itu, efektivitas administrasi pembangunan dalam mengelola anggaran menjadi faktor krusial dalam mencapai pembangunan ekonomi lokal yang merata dan berkelanjutan (Yani & Fitriani, 2019).

Perencanaan anggaran yang baik merupakan awal dari proses pembangunan yang sukses. Administrasi pembangunan bertugas memastikan bahwa proses perencanaan dilakukan berdasarkan data yang valid dan kebutuhan nyata masyarakat. Dalam praktiknya, sering terjadi ketidaksesuaian antara rencana pembangunan yang telah disusun dengan realisasi anggaran yang dilaksanakan. Hal ini dapat disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar lembaga, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, serta pengaruh politik lokal. Keberhasilan pembangunan ekonomi lokal sangat tergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan dan merealisasikan anggaran dengan tepat sasaran. Jika proses administrasi pembangunan tidak berjalan dengan optimal, maka output pembangunan juga akan kurang efektif dan efisien. Oleh sebab itu, pendekatan manajemen strategis dalam administrasi pembangunan menjadi sangat penting (Ramadhan & Suryani, 2020).

Selain aspek perencanaan, pengorganisasian dalam administrasi pembangunan juga memainkan peran penting. Pengorganisasian berkaitan erat dengan struktur birokrasi, pembagian tugas, serta alokasi sumber daya. Dalam konteks anggaran daerah, pengorganisasian yang tidak jelas akan menyebabkan tumpang tindih program, pemborosan anggaran, bahkan potensi korupsi. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memperkuat tata kelola administrasi yang baik (*good governance*) melalui penguatan sistem pengawasan dan evaluasi internal. Efektivitas anggaran tidak hanya diukur dari besarnya serapan, tetapi juga dari dampak nyata terhadap pembangunan ekonomi lokal. Ketika administrasi pembangunan berjalan secara sistematis, maka pembangunan akan berjalan lebih terarah, partisipatif, dan berkelanjutan. Dengan begitu, potensi ekonomi lokal seperti UMKM, pertanian, dan pariwisata dapat berkembang optimal (Safitri & Nugroho, 2021).

Implementasi program pembangunan daerah juga sangat bergantung pada bagaimana pengawasan dilakukan. Administrasi pembangunan yang efektif harus dilengkapi dengan sistem monitoring dan evaluasi yang akurat. Banyak kasus ketidakefisienan anggaran disebabkan oleh lemahnya kontrol terhadap pelaksanaan program. Dalam banyak daerah, pengawasan masih bersifat administratif, belum substantif terhadap hasil pembangunan. Padahal, hasil dari anggaran pembangunan harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat lokal. Dengan pengawasan yang baik, penyimpangan penggunaan anggaran dapat diminimalkan dan efisiensi dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, sistem pengawasan berbasis kinerja perlu dikembangkan sebagai bagian dari reformasi administrasi pembangunan di tingkat daerah (Putra & Salim, 2022).

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam administrasi pembangunan yang efektif. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran akan mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi. Partisipasi publik dapat dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), survei kebutuhan masyarakat, atau mekanisme pengaduan. Namun, dalam praktiknya, partisipasi tersebut sering kali bersifat formalitas tanpa keterlibatan substantif dari warga. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong inklusi sosial dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan aktif. Ketika masyarakat merasa dilibatkan, maka tingkat kepercayaan terhadap pemerintah pun meningkat, dan pada akhirnya pembangunan ekonomi lokal dapat berjalan dengan lebih optimal (Nasution & Hidayat, 2023).

Terakhir, sinergi antar pemangku kepentingan menjadi syarat penting untuk mengoptimalkan efektivitas administrasi pembangunan. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengelola anggaran dan membangun ekonomi lokal. Peran lembaga legislatif, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan akademisi sangat diperlukan. Kolaborasi yang kuat antar aktor pembangunan dapat menciptakan kebijakan yang responsif, inovatif, dan adaptif terhadap dinamika lokal. Dalam banyak kasus, kegagalan pembangunan bukan disebabkan oleh kurangnya anggaran, tetapi karena lemahnya koordinasi dan komunikasi antar lembaga. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif dalam administrasi pembangunan harus dikembangkan sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah. Dengan demikian, anggaran daerah tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi instrumen nyata yang mendukung kesejahteraan masyarakat (Kusuma & Zulfikar, 2024).

2. TINJAUAN TEORITIS

Administrasi pembangunan merupakan suatu proses manajerial yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan pembangunan yang dilakukan secara sistematis dan terarah untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan sosial. Dalam konteks pengelolaan anggaran daerah, administrasi pembangunan memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa dana publik dialokasikan dan dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Efektivitas administrasi pembangunan dapat dilihat dari sejauh mana proses administrasi tersebut mampu mendorong realisasi program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Teori efektivitas organisasi juga berperan dalam menjelaskan hubungan antara sistem administrasi yang baik dan keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan. Administrasi pembangunan yang efektif ditandai dengan adanya koordinasi antarlembaga, keterbukaan informasi publik, dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran (Ardiansyah & Ramli, 2021).

Konsep Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan merupakan cabang dari ilmu administrasi publik yang secara khusus membahas proses pengelolaan kebijakan, program, dan sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan. Dalam konteks pemerintahan daerah, administrasi pembangunan berfungsi sebagai sistem manajemen yang mengarahkan aktivitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program pembangunan. Administrasi ini mencakup pengaturan birokrasi, koordinasi antar lembaga, serta pelibatan masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas administrasi pembangunan sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, serta nilai-nilai tata kelola yang dianut pemerintah daerah. Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap tuntutan pembangunan yang semakin kompleks dan multidimensi (Hasibuan & Arifin, 2020).

Dalam penerapannya, administrasi pembangunan harus adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Perubahan kebijakan nasional, desentralisasi fiskal, dan otonomi daerah mengharuskan administrasi pembangunan memiliki fleksibilitas tanpa kehilangan integritas tata kelola. Oleh karena itu, administrasi pembangunan yang modern mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Di samping itu, peran teknologi informasi menjadi penting dalam meningkatkan efisiensi administrasi dan pelayanan publik. Konsep e-government menjadi bagian dari strategi modernisasi administrasi pembangunan yang bertujuan mempercepat pencapaian target pembangunan

melalui penggunaan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan (Prasetyo & Kurniawan, 2021).

Pengelolaan Anggaran Daerah dalam Perspektif Administrasi

Anggaran daerah merupakan instrumen utama dalam mengimplementasikan kebijakan publik di tingkat lokal. Dalam administrasi pembangunan, anggaran berfungsi sebagai alat koordinasi dan pengendalian terhadap program-program pembangunan. Penyusunan anggaran harus berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Proses ini menuntut ketepatan dalam perencanaan, ketegasan dalam prioritas pembangunan, serta konsistensi antara kebijakan dan alokasi dana. Tanpa pengelolaan anggaran yang tepat, pembangunan ekonomi lokal akan stagnan dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Fauzi & Ridwan, 2022).

Efektivitas pengelolaan anggaran dalam administrasi pembangunan sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, penganggaran berbasis kinerja, serta sistem pengawasan internal yang kuat. Anggaran daerah bukan hanya sekadar jumlah angka dalam dokumen, tetapi mencerminkan strategi pembangunan dan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, kendala seperti keterlambatan penetapan anggaran, rendahnya serapan anggaran, dan lemahnya akuntabilitas kerap menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi sistem anggaran melalui penguatan kapasitas aparatur dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik untuk mendukung keberhasilan pembangunan lokal (Lestari & Mahardika, 2023).

Pembangunan Ekonomi Lokal dan Peran Pemerintah Daerah

Pembangunan ekonomi lokal merupakan pendekatan pembangunan yang menekankan pada penguatan potensi ekonomi di wilayah tertentu, dengan memaksimalkan peran masyarakat dan pelaku usaha lokal. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, menyediakan infrastruktur pendukung, serta memberdayakan sektor-sektor unggulan lokal seperti UMKM, pertanian, perikanan, dan pariwisata. Dalam konteks administrasi pembangunan, keberhasilan pembangunan ekonomi lokal tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh efektivitas manajemen pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Handayani & Yusuf, 2020).

Peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi lokal juga melibatkan kemitraan strategis dengan sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini diperlukan untuk menciptakan inovasi, membuka lapangan kerja, dan

meningkatkan daya saing daerah. Untuk itu, anggaran daerah harus diarahkan secara tepat guna mendukung program-program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Ketika anggaran digunakan dengan efisien dan terukur, maka pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai. Dalam hal ini, administrasi pembangunan yang efektif bertindak sebagai penggerak utama dalam menjembatani kebijakan fiskal dan realitas pembangunan ekonomi masyarakat lokal (Siregar & Wulandari, 2021).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka (library research) untuk menggali secara mendalam konsep efektivitas administrasi pembangunan dalam konteks pengelolaan anggaran daerah. Data yang dikaji bersumber dari literatur ilmiah, seperti jurnal-jurnal nasional terakreditasi, buku referensi terbaru, laporan kebijakan pemerintah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menelaah kesesuaian antara teori dan praktik pengelolaan anggaran daerah serta implikasinya terhadap pembangunan ekonomi lokal. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan pemahaman teoritis dan konseptual yang kuat sebagai dasar dalam menilai efektivitas kebijakan anggaran di tingkat pemerintah daerah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas administrasi pembangunan sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan anggaran dan koordinasi antarlembaga pemerintah daerah. Dalam banyak kasus, perencanaan anggaran belum sepenuhnya berbasis data yang akurat dan partisipatif. Akibatnya, banyak program pembangunan yang tidak tepat sasaran atau mengalami duplikasi. Selain itu, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses Musrenbang menyebabkan prioritas pembangunan tidak mencerminkan kebutuhan lokal. Pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas perencanaan dengan pendekatan berbasis bukti serta meningkatkan transparansi anggaran.

Pembahasan juga menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembangunan sering terkendala oleh lemahnya pengawasan internal dan tidak maksimalnya tindak lanjut atas hasil evaluasi. Banyak daerah belum memiliki sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja yang kuat. Hal ini berdampak pada rendahnya efisiensi anggaran dan minimnya dampak terhadap pembangunan ekonomi lokal, seperti pertumbuhan UMKM dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, efektivitas administrasi pembangunan perlu ditingkatkan melalui reformasi

birokrasi, penguatan sistem audit internal, dan penerapan prinsip tata kelola yang baik agar anggaran benar-benar berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1. Efektivitas Perencanaan Anggaran Daerah

No	Indikator Evaluasi	Kondisi Ideal	Realita di Lapangan
1	Penyusunan Berbasis Data	Didukung data akurat dan partisipatif	Kurang berbasis data dan cenderung normatif
2	Keterlibatan Publik	Partisipasi aktif masyarakat	Partisipasi simbolik dan terbatas
3	Kesesuaian Program	Program sesuai prioritas pembangunan	Banyak program tidak sesuai kebutuhan lokal
4	Koordinasi Lintas OPD	Terintegrasi antar dinas/lembaga	Kurang koordinatif dan tumpang tindih
5	Konsistensi Anggaran	Selaras dengan RPJMD dan RKPD	Sering berubah karena tekanan politik

Penjelasan Tabel 1:

Tabel di atas menunjukkan kelemahan dan kekuatan dalam proses perencanaan anggaran daerah yang menjadi bagian penting dari administrasi pembangunan. Kondisi ideal seharusnya didasarkan pada data yang akurat dan mekanisme partisipatif. Namun pada praktiknya, banyak perencanaan dilakukan secara top-down dan minim riset empiris, sehingga kurang mencerminkan kebutuhan lokal yang riil. Hal ini berdampak pada efektivitas program pembangunan yang dijalankan.

Keterlibatan publik juga belum optimal, meskipun secara formal telah dilakukan Musrenbang. Banyak masyarakat merasa hanya dilibatkan sebagai pelengkap administrasi tanpa kontribusi nyata. Kelemahan lainnya terletak pada koordinasi antarlembaga pemerintah daerah yang sering berjalan sendiri-sendiri, menyebabkan tumpang tindih anggaran dan program. Inkonsistensi antara rencana dan alokasi anggaran juga kerap terjadi karena adanya intervensi politik dalam proses pengesahan anggaran.

Tabel 2. Implementasi dan Pelaksanaan Program Pembangunan Ekonomi Lokal

No	Aspek Pelaksanaan	Kondisi Ideal	Realita di Lapangan
1	Ketersediaan SDM	Aparatur profesional dan kompeten	Masih banyak aparatur belum tersertifikasi
2	Efisiensi Pelaksanaan	Program tepat waktu dan sesuai perencanaan	Banyak program mengalami keterlambatan
3	Pengadaan Barang/Jasa	Transparan dan efisien	Rentan penyimpangan dan tidak terbuka
4	Alokasi Anggaran	Proporsional berdasarkan urgensi kebutuhan	Tidak proporsional antar sektor
5	Monitoring Internal	Pengawasan melekat dan tepat waktu	Lemah dan hanya bersifat administratif

Penjelasan Tabel 2:

Pelaksanaan program merupakan titik krusial dari administrasi pembangunan. Idealnya, program dilaksanakan oleh sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi teknis dan

etika administrasi. Namun, banyak aparatur pemerintah di daerah yang belum memiliki kapasitas yang memadai dalam mengelola program, baik dari segi teknis pelaksanaan maupun manajemen anggaran. Hal ini berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan dan keberlanjutan program ekonomi lokal.

Kendala lainnya mencakup proses pengadaan barang dan jasa yang masih belum transparan. Beberapa daerah bahkan mengalami keterlambatan penyerapan anggaran karena lemahnya sistem pengawasan internal. Selain itu, alokasi anggaran tidak jarang didistribusikan tidak proporsional, misalnya terlalu fokus pada pembangunan fisik dan mengabaikan pemberdayaan ekonomi. Lemahnya pengawasan membuat potensi penyimpangan tetap tinggi dan berdampak langsung pada pencapaian tujuan pembangunan.

Tabel 3. Evaluasi dan Pengawasan Anggaran Pembangunan

No	Aspek Evaluasi	Kondisi Ideal	Realita di Lapangan
1	Pelaporan Kinerja	Disusun berdasarkan indikator dan hasil	Fokus pada administrasi, bukan hasil
2	Audit Internal	Dilakukan berkala dan independen	Terbatas dan tidak mendalam
3	Partisipasi Masyarakat	Publik diberi akses terhadap informasi	Minim sosialisasi dan akses terbatas
4	Transparansi Informasi	Informasi terbuka dan mudah diakses publik	Sering disembunyikan atau sulit diakses
5	Tindak Lanjut Temuan	Segara ditindaklanjuti oleh lembaga terkait	Sering diabaikan atau tidak ditindaklanjuti

Penjelasan Tabel 3:

Evaluasi dan pengawasan merupakan aspek penting dalam menjaga efektivitas administrasi pembangunan, terutama dalam konteks akuntabilitas anggaran daerah. Evaluasi yang ideal menitikberatkan pada capaian hasil (outcome) bukan sekadar output fisik atau laporan administratif. Namun, banyak pemerintah daerah masih menjadikan pelaporan sebagai kewajiban administratif tanpa melihat capaian substansial dari program pembangunan.

Transparansi dan akses publik terhadap hasil evaluasi juga masih rendah. Masyarakat sebagai penerima manfaat tidak mendapatkan informasi yang utuh tentang pelaksanaan dan hasil pembangunan. Bahkan ketika terdapat temuan audit, sering kali tidak diikuti dengan tindakan korektif dari instansi terkait. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum berjalan maksimal, dan diperlukan reformasi sistem evaluasi yang lebih terbuka dan partisipatif.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa efektivitas administrasi pembangunan dalam mengelola anggaran daerah merupakan kunci utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan. Administrasi yang lemah akan

berdampak pada ketidaktepatan perencanaan, inefisiensi anggaran, dan minimnya dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola pemerintahan daerah melalui peningkatan kapasitas perencanaan, pengawasan yang akuntabel, serta pelibatan aktif masyarakat. Jika hal ini dilakukan secara konsisten, maka pengelolaan anggaran daerah tidak hanya menjadi alat teknis, melainkan juga instrumen strategis dalam pembangunan.

REFERENSI

- Ardiansyah, R., & Ramli, M. (2021). Efektivitas administrasi pembangunan dalam pengelolaan anggaran publik di era otonomi daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 13(1), 22-35.
- Fauzi, R., & Ridwan, M. (2022). Pengelolaan anggaran daerah dalam perspektif efektivitas administrasi publik. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 9(2), 87-98.
- Handayani, D., & Yusuf, M. (2020). Peran pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal berbasis potensi daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 7(1), 55-66.
- Hasibuan, A., & Arifin, S. (2020). Konsep administrasi pembangunan: Perspektif teoretis dan implementasi di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 5(2), 100-112.
- Kusuma, D., & Zulfikar, R. (2024). Sinergi antar pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas administrasi pembangunan daerah. *Jurnal Inovasi Pemerintahan Daerah*, 6(1), 14-25.
- Lestari, S., & Mahardika, A. (2023). Reformasi pengelolaan anggaran berbasis kinerja untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah. *Jurnal Tata Kelola Keuangan Daerah*, 4(2), 77-88.
- Nasution, H., & Hidayat, T. (2023). Partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah: Tantangan dan strategi implementasi. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 12(3), 90-103.
- Prasetyo, B., & Kurniawan, R. (2021). Digitalisasi pemerintahan dalam modernisasi administrasi pembangunan di era industri 4.0. *Jurnal Transformasi Pemerintahan*, 10(1), 48-60.
- Putra, I., & Salim, H. (2022). Pengawasan berbasis kinerja sebagai strategi efisiensi anggaran pembangunan. *Jurnal Akuntabilitas Pemerintahan*, 8(2), 65-76.
- Ramadhan, A., & Suryani, M. (2020). Perencanaan anggaran strategis dalam administrasi pembangunan daerah. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 6(1), 33-45.
- Safitri, N., & Nugroho, D. (2021). Efektivitas pengorganisasian dalam administrasi pembangunan untuk optimalisasi anggaran. *Jurnal Administrasi dan Pembangunan Nasional*, 9(2), 99-110.

- Siregar, Y., & Wulandari, E. (2021). Kebijakan anggaran daerah dan dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi lokal. *Jurnal Ekonomi Regional*, 5(3), 72-84.
- Yani, L., & Fitriani, R. (2019). Analisis peran administrasi pembangunan dalam efektivitas anggaran daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Daerah*, 4(2), 58-70.
- Yusuf, A., & Handoko, S. (2021). Kapasitas birokrasi dalam implementasi program pembangunan daerah berbasis kinerja. *Jurnal Reformasi Kebijakan Publik*, 3(1), 45-56.
- Zainal, M., & Kartika, F. (2022). Strategi pembangunan ekonomi lokal melalui efektivitas manajemen keuangan daerah. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 11(2), 101-113.